

The Influence of Implementing Public Sector Accounting Reporting Standards, Monitoring the Quality of Financial Reports, and Accuracy of Budget Targets on Performance Accountability of Government Agencies (Case Study in Kedawung District, Sragen Regency)

Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan, Dan Ketepatan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen)

Aris Firnando^{1*}, Yuwita Ariessa Pravasanti², Rukmini³ 

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received, July 28, 2024

Revised, August 6, 2024

Accepted, August 30, 2024

Available online, September 5, 2024

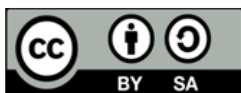
Kata Kunci:

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Ketepatan Target Anggaran, Pemantauan Kualitas Laporan Keuangan, Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik.

Keywords:

Accountability for the Performance of Government Agencies, Accuracy of Budget Targets, Monitoring the Quality of Financial Reports, Public Sector Accounting Reporting Standards.

About Article



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Aksara Shofa.

descriptive statistics, data quality (validity and reliability), and hypothesis testing (partial test, simultaneous test, and determination test). This research was conducted in the Kedawung District Government, Sragen Regency with a total sample of 54 respondents. The results of the research show that the Implementation of Public Sector Accounting Reporting Standards does not have a partially significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies, while Monitoring the Quality of Reports and Accuracy of Budget Targets has a partially significant effect on Accountability for

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, pemantauan kualitas laporan keuangan, dan ketepatan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data primer berupa kuesioner. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, kualitas data (validitas dan reliabilitas), dan uji hipotesis (uji parsial, uji simultan, dan uji determinasi). Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dengan jumlah sampel sebanyak 54 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan Pemantauan Kualitas Laporan dan Ketepatan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan secara simultan Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pemantauan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine whether there is an influence of the implementation of public sector accounting reporting standards, monitoring the quality of financial reports, and the accuracy of budget targets on the accountability of government agency performance. This research uses quantitative methods by collecting primary data in the form of questionnaires. Testing research hypotheses uses multiple linear regression analysis using the SPSS application. The method used is a quantitative research method. The analytical methods used are

*Penanggung Jawab

E-mail : firmandoir@gmail.com (Penulis Pertama)*

E-mail : yuwita.ariessa.pravasanti@gmail.com (Penulis Kedua)

E-mail : rukmini.stie.aas@gmail.com (Penulis Ketiga)

the Performance of Government Agencies. And simultaneously, the implementation of Public Sector Accounting Reporting Standards, Clarity of Budget Targets and Monitoring of the Quality of Financial Reports influence the Performance Accountability of Government Agencies.

1. PENDAHULUAN

Organisasi Sektor Publik sering diartikan sebagai organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya pada kepentingan publik, maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Salah satu jenis organisasi sektor publik adalah pemerintah. Pada hakekatnya organisasi sektor publik pemerintah merupakan roda pemerintahan yang berasal dari masyarakat. Masyarakat sudah memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu harus diimbangi dengan tata kelola pemerintah yang baik.

Kinerja instansi pemerintah kini telah mendapat banyak sorotan dikarenakan ada beberapa instansi pemerintah yang kurang begitu peduli terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih efisien, hal itu terlihat dari masih banyaknya kinerja instansi pemerintah yang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal tersebut menimbulkan semakin meningkatnya tuntutan yang diajukan masyarakat kepada pemerintah yaitu tuntutan agar terwujudnya pemerintahan yang amanah, efektif, efisien, dan bertanggungjawab. Keadaan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja yang berlangsung kurang maksimal.

Untuk menghadapi keadaan tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa faktor yang menjadi kelemahan atau bahkan memperkuat efektifitas pertanggungjawaban kinerja atas wewenang yang mempengaruhi akuntabilitas. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kompetensi dan meningkatkan sikap profesionalisme serta memiliki sikap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya (Bastian, 2011). Kebijakan reformasi keuangan negara atau daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* pada instansi pemerintah di Indonesia mulai dilaksanakan seiring dengan berlakunya aturan mengenai implementasi standar akuntansi pemerintah dalam Peraturan Pemerintah. Prinsip yang harus dilaksanakan adalah tata kelola keuangan yaitu penyajian laporan keuangan yang baik. Agar terwujud *good governance* instansi pemerintah perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah sehingga akan meminimalisir praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Dwiyanto, 2012). Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada bidang politik akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dibiidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi.

Menurut Nurgaeni & Budiantara (2019) akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Semua instansi pemerintah pusat maupun daerah harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah dapat diperbandingkan, dan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara penyaji laporan keuangan, pengguna laporan keuangan maupun pengawas laporan keuangan. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan- urusan pemerintah dapat optimal. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi.

Menurut penelitian terdahulu Wiyana (2023) penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk

pelaksanaan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa transparansi laporan keuangan masyarakat terbuka dan dapat di akses masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Resti (2022) mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hal ini disebabkan SKPD Kota Bogor belum mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggara urusan pemerintah yang lebih baik.

Pengawasan keuangan merupakan proses penting yang melibatkan sejumlah langkah untuk memastikan integritas laporan keuangan. Internal kontrol dan audit eksternal adalah dua aspek utama dari pengawasan keuangan. Menurut Bierstaker, *et al.* (2018), sistem pengawasan keuangan yang kuat dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi penyimpangan atau kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Ketepatan sasaran anggaran pada sistem pemerintahan daerah adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk melihat kinerja yang berlangsung di lapangan apakah tepat pada sasaran pembangunan dan perkembangan masyarakat. Ketepatan sasaran anggaran di pemerintah daerah akan memberikan sangkutan terhadap kinerja aparat daerah yang lebih unggul, kemudian hasil akhir dari kinerja sendiri membentuk hasil akhir (*output*) organisasi yang searah dengan tujuan organisasi (Pratiwy, 2013). Penelitian tentang ketepatan sasaran anggaran telah banyak digarap, sementara penelitian tentang ketepatan sasaran anggaran masih sedikit dilakukan. Seperti yang di ungkapkan (2015) bahwasannya adanya ketepatan sasaran anggaran secara karakteristik akan meringankan untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi, maka mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik dalam rangka mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Meningkatkan ketepatan sasaran anggaran akan meningkatkan ketepatan anggaran pendapatan dan belanja di SKPD.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2019).

Populasi menurut Sugiyono (2019) merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur Pemerintah Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 54 pegawai.

Sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi yang memiliki karakteristik, dengan kata lain beberapa dari populasi, tetapi tidak berarti seluruhnya (Sugiyono, 2019). Proses pada pengambilan sampel dapat dikatakan sebagai proses yang penting, hal ini karena sampel harus akurat dan tepat agar menghasilkan kesimpulan suatu penelitian menjadi sesuai dengan harapan dan tidak menyesatkan (Jogiyanto, 2018). Pemilihan sampel dilakukan jika terdapat kesesuaian antara karakteristik sampel terhadap kriteria pemilihan sampel penelitian. Menurut Sugiyono (2019) sampling jenuh adalah teknik pemilihan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian.

Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif yang menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengolahan data menggunakan SPSS versi 23. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi) sedangkan untuk pengujian hipotesis menggunakan uji linear berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

1. Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas masing-masing item pernyataan pada tiap variabel diperoleh nilai r-hitung lebih besar daripada nilai r-tabel (0,2681), sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh indikator pernyataan dinyatakan valid dan layak untuk digunakan.

2. Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS, nilai *Cronbach's Alpha* pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,70 sehingga dapat dinyatakan lolos uji reliabilitas atau reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		54
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1.61237890
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,089
	<i>Positive</i>	0,089
	<i>Negative</i>	-0,081
<i>Test Statistic</i>		0,089
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,200 ^c

Sumber: Data SPSS diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, uji normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* dengan kriteria uji signifikansi $> \alpha$ ($\alpha = 0,05$), dapat disimpulkan bahwa penelitian ini distribusinya normal. Hal tersebut didasarkan dari hasil pengujian uji normalitas di atas yang menunjukkan bahwa hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200. Hasil tersebut menandakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
Standar Pelaporan Akuntansi	0,156	6,403
Kualitas Laporan Keuangan	0,160	6,232
Ketepatan Sasaran Anggaran	0,218	4,594

Sumber: Data SPSS diolah, 2024

Pada tabel 4.10 di atas, terdapat nilai tolerance dari variabel independent yaitu standar pelaporan akuntansi sektor publik 0,156, kualitas laporan keuangan 0,160, dan ketepatan sasaran anggaran 0,218. Dan untuk VIF standar pelaporan akuntansi sektor publik 6,403, kualitas laporan keuangan 6,232, dan ketepatan sasaran anggaran 4,594. Perolehan ini selaras pada persyaratan multikolinearitas yakni $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,10$.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 4.11
Hasil Uji Autokorelasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	0,230 ^a	0,053	0,034	0,04593052	1,986

Sumber: Data SPSS diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada tabel 4.11 di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 1,986. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak terjadi autokorelasi, dikarenakan nilai $Du < Dw < 4-Du$. Penentuan nilai *Du* tersebut dapat dilihat dari tabel *Durbin Watson*, yaitu dengan sampel data sejumlah 54, maka akan menghasilkan nilai *DL* sebesar 1,4464 dan nilai *Du* sebesar 1,68. Sedangkan nilai *Dw* yang diperoleh dari tabel *Durbin Watson* di atas yaitu sebesar 1,986. Dan untuk nilai $4-Du$ yaitu sebesar 2,32. Perhitungan tersebut diperoleh dari $4 - 1,68$. Sehingga dapat dirumuskan dengan perhitungan $Du < Dw < 4-Du$ atau $1,68 < 1,986 < 2,32$. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi, atau terbebas dari autokorelasi.

4. Uji Hipotesis

a. Analisis Linear Berganda

Tabel 4.12
Hasil Uji Linear Berganda

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	-0,787	1,387		-0,567	0,573

X1	-0,069	0,069	-0,078	-0,992	0,326
X2	0,204	0,080	0,196	2,539	0,014
X3	0,894	0,068	0,871	13,119	0,000

Sumber: Data SPSS diolah, 2024

Pada tabel 4.12 di atas, analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dapat dilihat dalam tabel di atas bahwa nilai konstanta yaitu -0,787 dan sementara itu nilai koefisien variabel Standar Pelaporan Akuntansi (X1) -0,069 dan variabel Kualitas Laporan Keuangan (X2) 0,204 kemudian untuk variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3) 0,894. Berdasarkan tabel hasil uji regresi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Atau

$$Y = -0,787 + -0,069 (X_1) + 0,204 (X_2) + 0,894 (X_3) + e$$

Keterangan:

- Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- a = Konstanta dari persamaan regresi
- X1 = Standar Pelaporan Akuntansi
- X2 = Kualitas Laporan Keuangan
- X3 = Ketepatan Sasaran Anggaran
- b 1,2,3 = Koefisien Regresi
- e = Variabel Pengganggu (*Error*)

Dari persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta (α) memiliki nilai negatif sejumlah -0,787. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa jika semua variabel independen yang terdiri dari Standar Pelaporan Akuntansi (X1), Kualitas Laporan Keuangan (X2), dan Ketepatan Sasaran Anggaran (X3) bernilai nol, maka nilai (Y) adalah -0,787.
 - 2) Nilai koefisien pada variabel Standar Pelaporan Akuntansi (X1) yaitu sebesar -0,069. Nilai ini menunjukkan pengaruh yang negatif, atau berlawanan arah antara variabel independen Standar Pelaporan Akuntansi dengan variabel dependen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jika variabel Penerapan X1 meningkat sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar -0,069 dengan asumsi bahwa variabel independent lainnya tetap konstan.
 - 3) Nilai koefisien pada variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X2) yaitu sebesar 0,204. Nilai ini menunjukkan pengaruh positif, atau searah antara variabel independent Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan dengan variabel dependen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jika Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan meningkat sebesar 0,204 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap konstan.
 - 4) Nilai koefisien pada variabel Ketepatan Sasaran Anggaran (X3) yaitu sebesar 0,894. Nilai ini menunjukkan pengaruh positif, atau searah antara variabel independen dengan variabel dependen. Jika variabel Ketepatan Sasaran Anggaran (X2) mengalami kenaikan 1 satuan, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan naik sebesar 0,894 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap konstan atau tidak berubah.
- b. Uji F

Tabel 4.13
Hasil Uji F

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	2736,749	3	912,250	331,035	0,000 ^b
	Residual	137,788	50	2,756		
	Total	2874,537	53			

Sumber: Data SPSS diolah, 2024

Dari tabel 4.13 di atas, dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Selain itu juga didapati nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel (331,035 > 0,19), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (independen) yang meliputi penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, pengawasan kualitas laporan keuangan, dan ketepatan sasaran anggaran memberikan pengaruh simultan (secara bersama-sama) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- c. Uji t

Tabel 4.14
Hasil Uji t

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
Standar Pelaporan Akuntansi (X1)	-0,992	1,674	0,326	Tidak berpengaruh
Kualitas Laporan keuangan (X2)	2,539	1,674	0,014	Berpengaruh
Ketepatan Sasaran Anggaran (X3)	13,119	1,674	0,000	Berpengaruh

Sumber: Data SPSS diolah, 2024

- 1) Dapat dilihat dari hasil uji t pada tabel 4.14 di atas bahwa di peroleh nilai t hitung pada variabel X1 (Standar Pelaporan Akuntansi) sebesar $-0,992 < t \text{ tabel } (-0,992 < 1,674)$ dan nilai sig sebesar $0,326 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh parsial antara variabel X1 (Standar Pelaporan Akuntansi) terhadap variabel Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
 - 2) Dapat dilihat dari hasil uji t pada tabel 4.14 di atas bahwa di peroleh nilai t hitung pada variabel X2 (Kualitas Pelaporan Keuangan) sebesar $2,539 > t \text{ tabel } (2,539 > 1,674)$ dan nilai sig $0,014 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial antara variabel X2 (Kualitas Pelaporan Keuangan) terhadap variabel Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
 - 3) Dapat dilihat dari hasil uji t pada tabel 4.14 di atas bahwa di peroleh nilai t hitung pada variabel X3 (Ketepatan Sasaran Anggaran) sebesar $13,119 > t \text{ tabel } (13,119 > 1,674)$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial antara variabel X3 (Ketepatan Sasaran Anggaran) terhadap variabel Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
- d. Uji Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 4.15
Hasil Uji Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,976 ^a	0,952	0,949	1,660

Sumber: Data SPSS diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, dapat diketahui nilai dari koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,949. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa variabel Standar Pelaporan Akuntansi (X1), Kualitas Laporan Keuangan (X2), dan Ketepatan Sasaran Anggaran (X3) mampu mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebesar 0,949 atau 94,9 %. Hasil ini menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara variabel terikat dengan variabel bebas, sedangkan sisanya sebesar 5,1 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

3.2. Pembahasan

1. Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik

Pada variabel Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik pengujian uji t menunjukkan hasil tidak terdapat pengaruh secara parsial karena t hitung sebesar $-0,992$ yang lebih kecil dari t tabel sebesar $1,674$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh signifikan Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinyatakan ditolak. Artinya variabel penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen.

Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik yang kurang disebabkan karena masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memahami esensi, makna dan operasional dalam penerapan standar akuntansi sektor publik ini. Hal tersebut juga dilandasi faktor adanya pergantian pejabat di daerah yang sangat dinamis, yang mengakibatkan sering terjadinya mutasi atau pergantian pejabat yang dimana sudah memahami implementasi standar akuntansi sektor publik diganti dengan pejabat yang baru, padahal standar dan

kebijakannya baru ditetapkan. Hal ini mengakibatkan pejabat yang baru belum memahami mengenai penerapan standar tersebut.

Hal ini sejalan dengan penelitian Resti (2022) mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hal ini disebabkan SKPD Kota Bogor belum mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggara urusan pemerintah yang lebih baik. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wiyana, 2023) penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa transparansi laporan keuangan masyarakat terbuka dan dapat di akses masyarakat.

2. **Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan**

Pada variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan pengujian uji t menunjukkan hasil terdapat pengaruh secara parsial karena t hitung sebesar 2,539 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,674. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh signifikan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinyatakan diterima. Artinya variabel Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen.

Hasil pengaruh positif ini berarti apabila semakin tingginya tingkat pengawasan kualitas laporan keuangan suatu pemerintahan, maka akan semakin meningkatnya juga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut. Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah adalah syarat terciptanya penyelenggaraan Pemerintah yang baik. Bentuk pertanggungjawaban atau Akuntabilitas kinerja Pemerintah salah satunya dengan menyajikan Laporan Keuangan yang berkualitas. Dengan kata lain, apabila Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku dan dilaporkan tepat waktu maka akan menghasilkan Laporan keuangan yang berkualitas.

Hal ini sejalan penelitian terdahulu (Sari, 2018) kualitas laporan keuangan secara signifikan memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terciptanya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah adalah syarat terciptanya penyelenggaraan Pemerintah yang baik. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwardana (2021) menunjukkan Kualitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

3. **Ketepatan Sasaran Anggaran**

Pada variabel Ketepatan Sasaran Anggaran pengujian uji t menunjukkan hasil terdapat pengaruh secara parsial karena t hitung sebesar 13,119 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,674. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh signifikan Ketepatan Sasaran Anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinyatakan diterima. Artinya variabel Ketepatan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen.

Pengaruh positif ini berarti apabila semakin jelasnya sasaran anggaran yang diterapkan di instansi pemerintahan, maka akan semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut. Ketepatan sasaran anggaran ini tentunya sangat memberikan pengaruh yang baik terhadap laporan keuangan pemerintahan, begitu juga akuntabilitas kerjanya. Pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang merupakan dokumen rencana pendapatan dan belanja SKPD digunakan sebagai acuan dasar dalam penyusunan rancangan APBD juga menjelaskan secara rinci mengenai pelaksana dan pejabatan anggaran pemerintahan. Sehingga jika anggaran di pertanggungjawabkan secara runtut dan jelas, maka akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang baik pula, sehingga laporan keuangan pemerintahan juga akan lebih maksimal. Dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat pula.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Widaryanti & Pancawardani, 2020) ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan sasaran anggaran yang jelas akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hal tersebut dikarenakan ketepatan sasaran anggaran dapat membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran yang jelas, tingkat kinerja akan tercapai. Namun hal ini

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafzhan (2021) menunjukkan Ketepatan Sasaran Anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, pengawasan kualitas laporan keuangan, dan ketepatan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja di Pemerintah Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Hasil uji hipotesis pada penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Hal ini berarti semakin tingginya penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, tidak menjamin akuntabilitas kerjanya instansi pemerintahannya.
- b. Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Hal ini berarti semakin baiknya pengawasan kualitas laporan keuangan, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahannya.
- c. Ketepatan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. Hal ini berarti semakin jelasnya tujuan dan sasaran anggaran dalam menjalankan penugasan profesionalnya, maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintahannya.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan penuh rasa hormat, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian jurnal berjudul "Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan, Dan Ketepatan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen)". Ucapan terima kasih ini kami tujukan kepada para penulis, peneliti, dan akademisi yang telah memberikan wawasan dan masukan berharga selama proses penelitian. Kami juga menghargai dukungan dari pihak pemerintah Kecamatan Kedawung dan Kabupaten Sragen yang telah menyediakan data dan informasi yang diperlukan. Tanpa dukungan dan kerjasama dari semua pihak, jurnal ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di masa mendatang.

6. REFERENSI

- Akhmad Yudi, dkk. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, Volume 2, No. 3.
- Anim Wiyana. (2023). *Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara*. 5.
- Anjarwati. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*. 1(2): 2012.1-7.
- Asdi & Munari. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, Volume 11, No.2.
- Astari. (2015). Pengaruh ketetapan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik pada akuntabilitas kinerja SKPD. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 12(1): 2015. 50-63.
- Aulia Firda & Sulistyowati Endah. (2023). Pengaruh Ketepatan Sasaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 12 No 6.

- Bastian, I. (2011). *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bierstaker, *et al.* (2018). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bandung *Conference Series: Accountancy*, 2(1).
- Dwiyanto, A. (2012). *Reformasi Birokrasi di Indonesia*, Edisi : Cet.Keempat. Yogyakarta: PSKK-UGM.
- Erinda, P., Lailatul, A. (2020). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Kualitas Sdm, Dan Pengendalian Manajerial Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(3), 4-5.
- Fedrinawati. (2016). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 2*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Hafzhan. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*. 1(2): 2012.1-7.
- Harahap, S. S. (2011). *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Helza & Elsa. (2023). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol.2, No.2.
- Indrayani (2022). *Modul Akuntansi Sektor Publik*. Parepare.
- Kenis. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jom Fekon*, 1(2).
- Kumba, D., Bambang, S., Reza, F. (2022). Analisis Determinan Kualitas Pelaporan Keuangan Perusahaan Non Jasa Keuangan Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(6), 2582.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan Pertama. Yogyakarta : UUI Press.10.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Morissan M. Et al., (2017). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Nazir. (2014). *Metodologi Penelitian*.
- Nurgaeni, & Budiantara, M. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan.
- Padilah & Adam. (2019). Analisis Regresi Linier Berganda Dalam Estimasi Produktivitas Tanaman Padi Di Kabupaten Karawang, *FIBONACCI J. Pendidik. Mat. dan Mat.*, vol. 5, no. 2
- Pamungkas. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintahan Hingga Tempat Ibadah*, edisi ke-2. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Pemerintah Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standa Akuntansi Pemerintahan* . Jakarta.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2010). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 TAHUN 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Pratami. (2021). *Pengaruh CAR, LDR, dan Inflasi terhadap ROA pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI*, Indonesian Journal of Economics and Management, 1: 410-418.
- Pratiwy (2013). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Unikom*.
- Ratu Ariska. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Di Instansi Pemerintah. *Skripsi*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Resti. (2022). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bandung *Conference Series: Accountancy*, 2(1).
- Robbil Ibat, Zalifatuh. (2022). *Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dalam Penentuan Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Pamekasan*. Diploma thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
- Rona, A., Elyanti, R., Achyat, B. (2024). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Akuntansi*, 6(2), 67-68.
- Rusdiana & Nasihusin. (2018). Kajian Penerapan Sistem Pelaporan SPT Manual dan e-SPT.
- Sari, P. W. (2015). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Unikom*.
- Sari. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Solok).
- Subiyanto. (2021). Kualitas Pelaporan Keuangan: Berbagai Faktor Penentu dan Konsekuensi Ekonomis. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, hal 20-45.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Suwardana. (2021). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pada Bpkad Kabupaten Ogan Ilir). 9-15.
- Tri Resti. (2022). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*. 12(2): 2012. 82-93.
- Widaryanti & Pancawardani. (2020). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan senjangan anggaran Terhadap kinerja pejabat eselon iii dan iv Pada dinas kesehatan kota kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 2(2): 2017. 61-72.
- Wiyana. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*.
- Yusra, M. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh.